



BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018

Jakarta, Juni 2017

OUTLINE

Kerangka Ekonomi Makro (KEM)

Arah Kebijakan Fiskal

Pokok–Pokok Kebijakan Fiskal

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Pasal 8 : Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : a. menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro ...

Pasal 13: Pemerintah Pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat selambat-lambatnya pertengahan bulan Mei tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Pasal 178:

Pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan rancangan APBN dilakukan segera setelah **Pemerintah menyampaikan bahan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pada pertengahan bulan Mei**, yang meliputi:

- a. kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran berikutnya;
- b. kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam penyusunan usulan anggaran; dan
- c. rincian unit organisasi, fungsi, program, dan kegiatan.

1

KERANGKA EKONOMI MAKRO

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Perekonomian Global, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Suku Bunga SPN 3 Bulan, Harga Minyak Indonesia (ICP), Lifting Minyak dan Gas Bumi

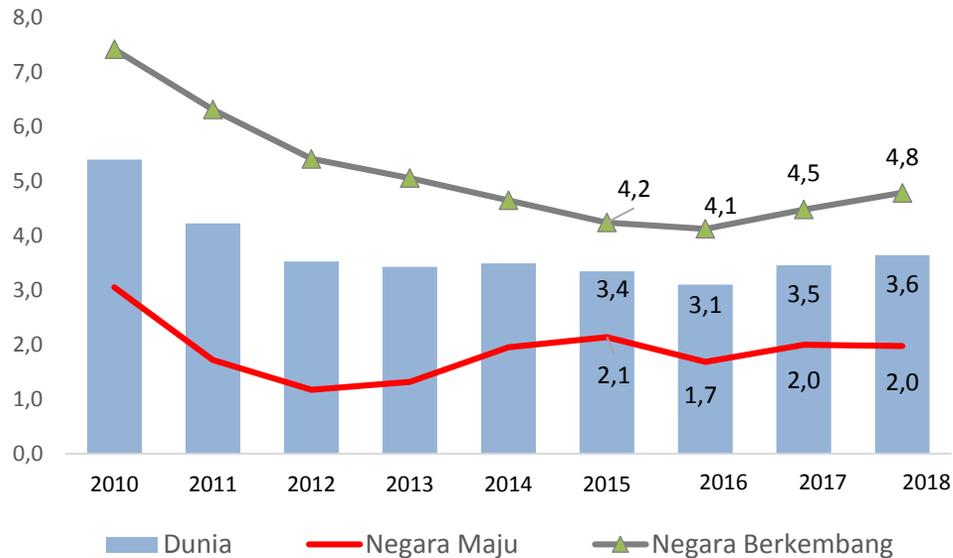
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2017 dan Proyeksi 2018

Indikator	2017	2018
	APBN	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi (%, <i>yoy</i>)	5,1	5,4 – 6,1
Laju Inflasi (%, <i>yoy</i>)	4,0	2,5 – 4,5
Tingkat Bunga SPN-3 bulan (%)	5,3	4,8 – 5,6
Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	13.300	13.500 – 13.800
Harga minyak mentah Indonesia (US\$/Barel)	45	45 - 60
<i>Lifting</i> Minyak Bumi (ribu barel per hari)	815	771 - 815
<i>Lifting</i> Gas Bumi (ribu barel setara minyak per hari)	1.150	1.194 – 1.235

Perekonomian Global di Tahun 2018 Diproyeksikan Tumbuh Moderat

Namun beberapa risiko eksternal masih perlu diwaspadai

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dunia (%)



Sumber: IMF, WEO April 2017

- Momentum pemulihan ekonomi global terjadi di tahun 2017.
- Namun di tahun 2018, kenaikan pertumbuhan global hanya berlangsung moderat.
- Prospek ekonomi AS diperkirakan akan terus membaik, namun kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan baru masih belum dapat sepenuhnya dipastikan.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara-Negara (%)

Negara	2015	2016	2017	2018
Amerika Serikat	2,6	1,6	2,3	2,5
Eropa	2,0	1,7	1,7	1,6
Jerman	1,5	1,8	1,6	1,5
Perancis	1,3	1,2	1,4	1,7
Italia	0,8	0,9	0,8	0,8
Inggris	2,2	1,8	2,0	1,5
Jepang	1,2	1,0	1,2	0,6
India	7,9	6,8	7,2	7,7
Tiongkok	6,9	6,7	6,6	6,2
ASEAN-5	4,8	4,9	5,0	5,2

Sumber: IMF, WEO April 2017

Beberapa risiko yang dapat mempengaruhi prospek ekonomi global:

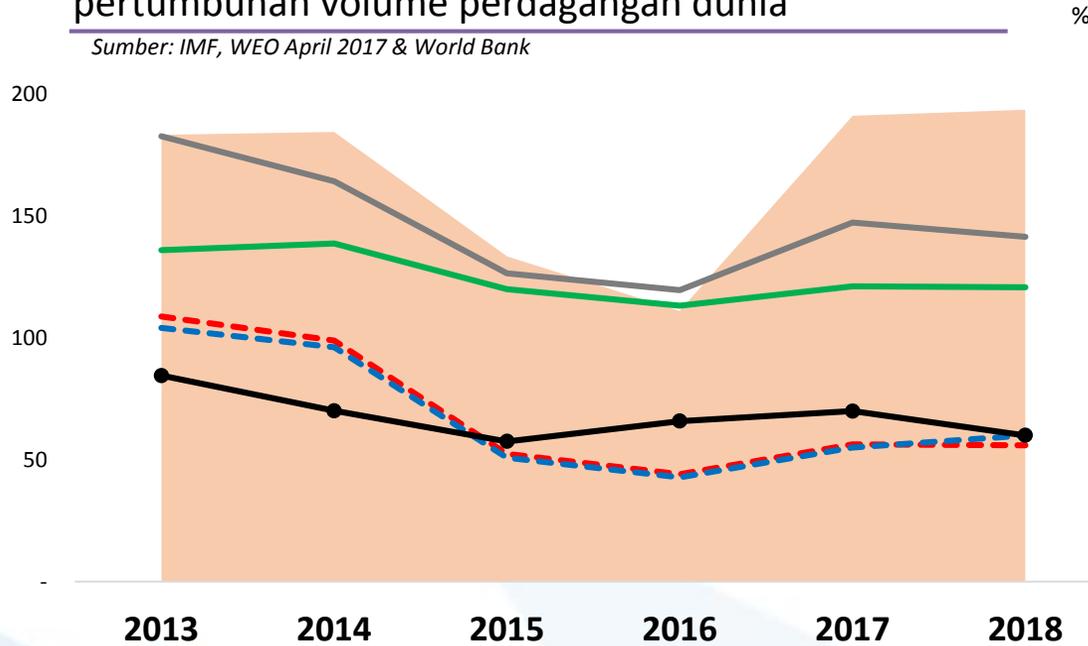
- Proteksionisme perdagangan.
- *Re-balancing* ekonomi Tiongkok.
- Penguatan dolar AS yang memicu pembalikan arus modal di negara berkembang.
- Harga komoditas yang masih lemah.
- Risiko geopolitik seperti dampak dari Brexit.
- Isu struktural di negara maju seperti penuaan populasi.

Pergerakan Harga Komoditas Dunia yang Relatif Stagnan pada Tahun 2018

Mendorong menurunnya tingkat inflasi global

Proyeksi pergerakan harga komoditas dan tingkat pertumbuhan volume perdagangan dunia

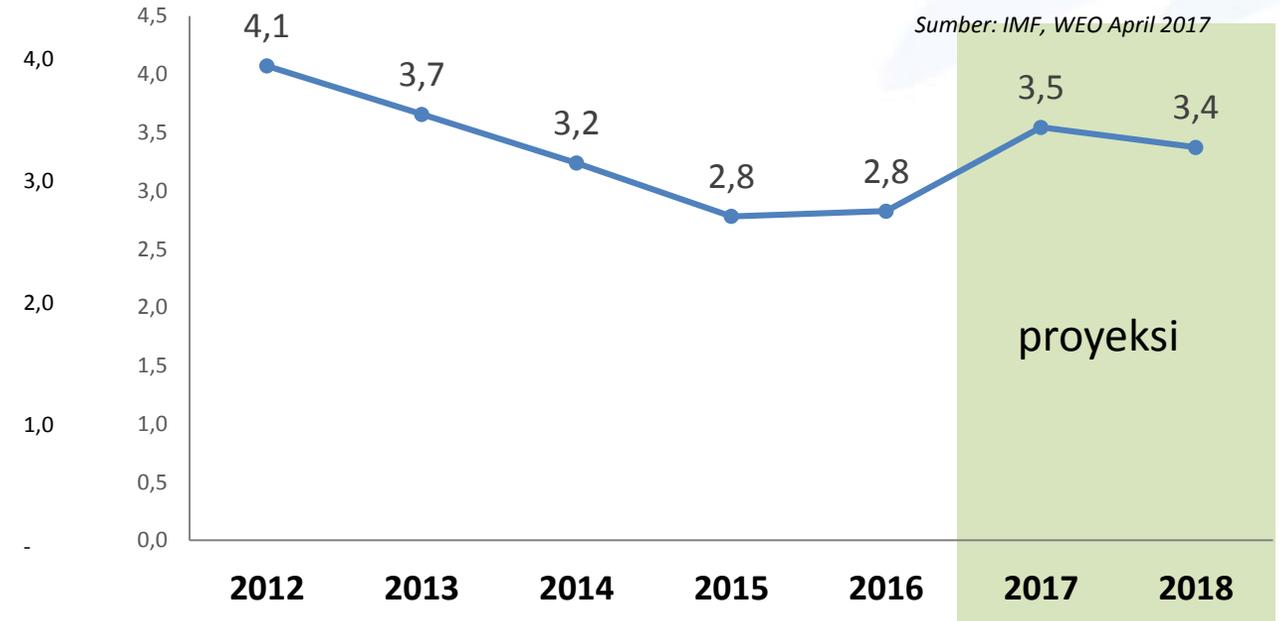
Sumber: IMF, WEO April 2017 & World Bank



	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan vol. Perdagangan Dunia (% YoY) RHS	3.7	3.7	2.7	2.2	3.8	3.9
Harga Minyak Mentah Brent (US\$ per barel)	108.8	98.9	52.4	44.0	56.3	55.9
Harga Minyak Mentah Rata-Rata (US\$ per barel)	104.1	96.2	50.8	42.8	55.0	60.0
Harga Batu Bara (\$, metric ton)	84.6	70.1	57.5	65.9	70.0	60.0
Commodity Agricultural Raw Material Index (2005=100)	136.1	138.8	120.1	113.3	121.2	120.9
Commodity Metal Price Index (2005=100)	182.9	164.4	126.6	119.7	147.5	141.6

Tingkat inflasi dunia (% rata-rata)

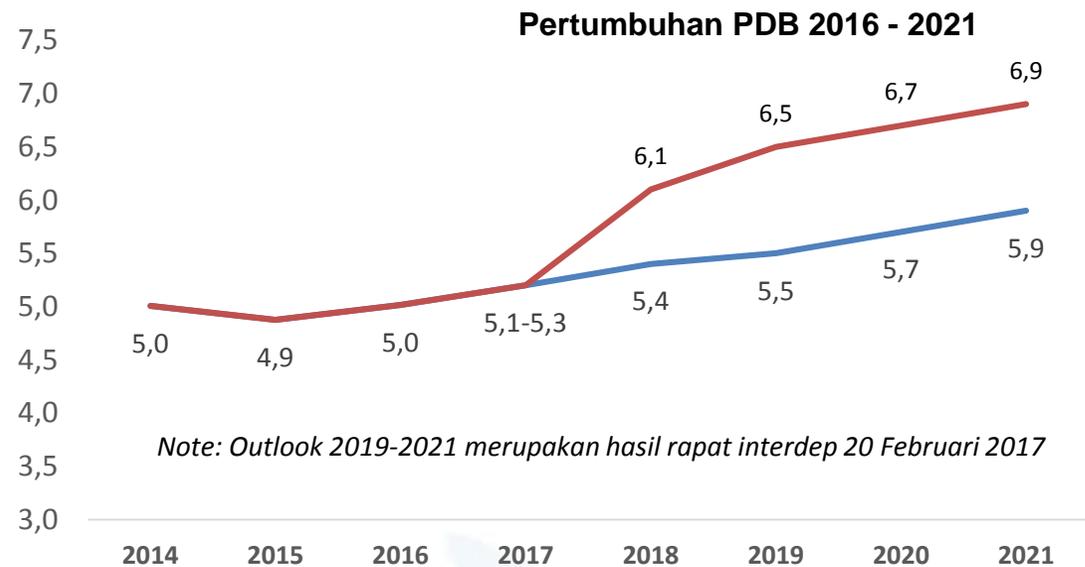
Sumber: IMF, WEO April 2017



- Pertumbuhan ekonomi di negara maju yang masih belum *sustainable* serta tren pelemahan pertumbuhan di Tiongkok berdampak pada harga komoditas global dan tingkat inflasi dunia.
- Tahun 2018, harga komoditas secara umum akan bergerak stagnan dan cenderung melambat.
- Tingkat inflasi dunia juga diproyeksikan menurun.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Diperkirakan Meningkat

Pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,6%



	2015	2016	Outlook 2017	Proyeksi 2018
Konsumsi RT*	4,8	5,0	5,0	5,4
Konsumsi Pemerintah	5,3	-0,1	4,6	4,3
PMTB	5,0	4,5	5,1	8,0
Ekspor	-2,1	-1,7	4,7	6,1
Impor	-6,4	-2,3	3,8	5,5
PDB	4,9	5,0	5,1	6,1

*) Sudah termasuk LNPRT

- **Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT:**

- Peningkatan daya beli masyarakat melalui upaya menjaga stabilitas harga dan alokasi anggaran ketahanan pangan.
- Belanja Sosial masyarakat yang semakin efektif dengan perbaikan skema Belanja PKH, Rastra, KIP, Belanja Kesehatan .
- Persiapan pelaksanaan Asian Games dan Pemilu Presiden.

- **Konsumsi Pemerintah:**

- Kebijakan belanja diarahkan untuk mengatasi ketimpangan.
- Percepatan dan perbaikan pola penyerapan anggaran pemerintah.
- Perbaikan pola belanja Pemerintah Daerah.
- Dukungan peningkatan sumber-sumber penerimaan negara.

- **Investasi:**

- Pembangunan infrastruktur dasar dan proyek fisik lainnya yang juga terfokus pada pemerataan antar wilayah.
- Pengadaan mesin, perlengkapan dan peralatan industri baru.
- Penguatan Capex dari Pasar Modal.
- Peningkatan peran Capex BUMN dan perusahaan swasta.
- Peningkatan penyaluran KMK dan KI.

- **Ekspor dan Impor:**

- Penambahan pasar ekspor baru.
- Peningkatan kerjasama bilateral untuk ekspor produk utama (bernilai tambah tinggi).

Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas

mendorong kinerja sektor-sektor kunci....

Sektor Lapangan Usaha	Pertumbuhan PDB (%)				
	2016	Outlook 2017		Proyeksi 2018	
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,3	3,4	3,5	3,6	4,0
2. Pertambangan dan Penggalian	1,1	1,2	1,4	1,4	1,7
3. Industri Pengolahan	4,3	4,6	4,9	4,9	5,7
4. Konstruksi	5,2	6,2	6,6	6,7	7,6
5. Perdagangan Besar dan Eceran	3,9	4,8	5,0	5,5	6,2
6. Transportasi dan Pergudangan	7,7	7,9	8,4	8,3	9,2
7. Informasi dan Komunikasi	8,9	9,9	10,3	10,5	11,9
8. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,9	9,8	10,0	10,1	11,0
PDB Nasional	5,0	5,1	5,3	5,4	6,1

- Sektor pertanian perlu ditingkatkan melalui program modernisasi dan penerapan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas pertanian.
- Perlu pendalaman industri berbasis sumber daya alam dengan hilirisasi.
- Perlu mendorong investasi di sektor pertambangan, khususnya di bidang energi.
- Akselerasi pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi harus terus dilakukan.
- Produktivitas sektor jasa harus dijaga dan ditingkatkan, melalui:
 - a. Sektor konstruksi, transportasi, informasi-komunikasi untuk mendukung efisiensi sistem logistik nasional.
 - b. Mendorong perkembangan sektor jasa keuangan melalui kebijakan *financial deepening & financial inclusion*.

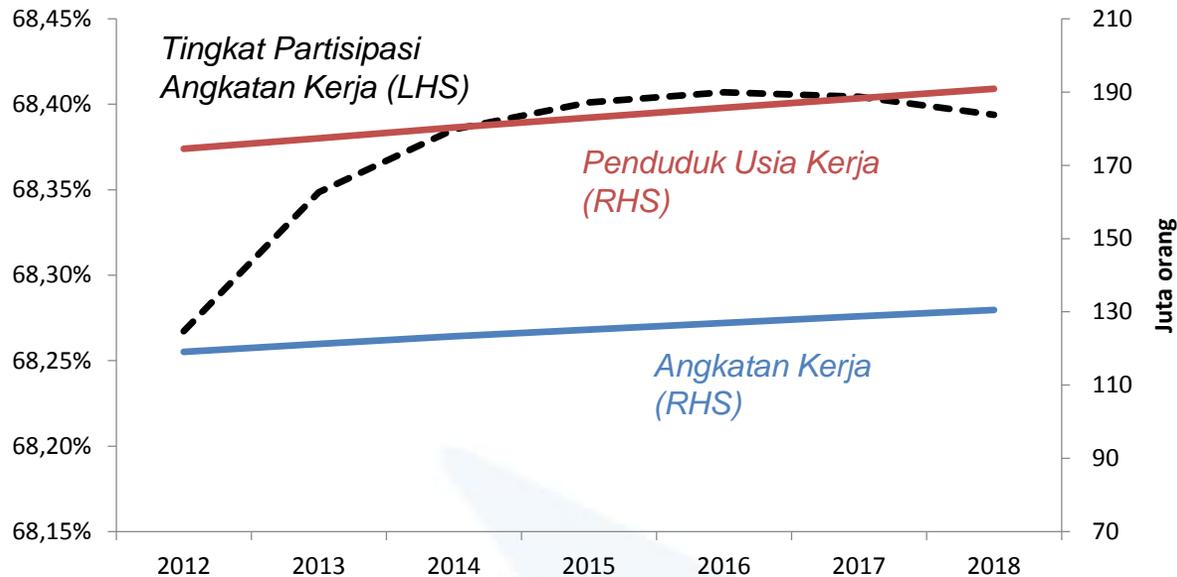
Sumber : BPS, Bappenas & Kementerian Keuangan



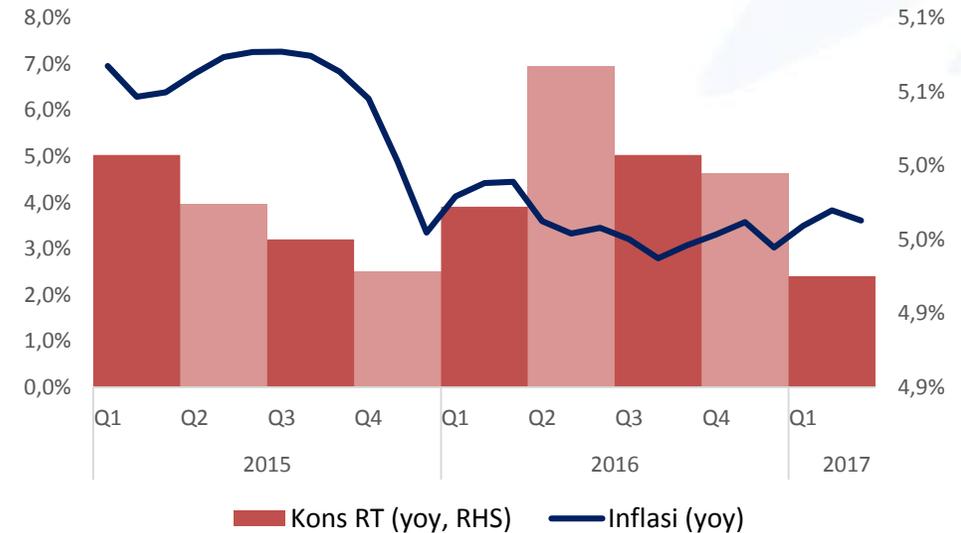
Konsumsi RT didorong oleh masyarakat menengah yang tinggi dan tingkat inflasi yang stabil

... Konsumsi LNPRT juga diperkirakan mendukung konsumsi...

Angkatan Kerja



Inflasi dan Konsumsi RT



- Daya beli masyarakat menjadi kunci utama, faktor yang mempengaruhi: pendapatan dan inflasi
- Perkiraan peningkatan golongan masyarakat menengah juga diperkirakan mendorong konsumsi
 - Usia produktif yang tinggi diperkirakan akan masih berlanjut sehingga mendorong konsumsi RT
 - Golongan kelompok menengah diperkirakan juga tetap meningkat sejalan peningkatan usia produktif
- Stabilitas harga adalah faktor utama, terutama harga bahan pokok bagi masyarakat yg rentan
 - Sekitar 40% dari populasi berada pada kelompok miskin dan rentan
- Konsumsi LNPRT juga diperkirakan mendukung kinerja konsumsi
 - Asian Games, pilkada serentak 171 daerah dan kegiatan sosial baik keagamaan maupun sosial lainnya



Arah Kebijakan Pencapaian Sumber Pembiayaan Investasi

...diperlukan kerja keras untuk mendukung pembiayaan investasi 2017-2018

Sumber Investasi	2015		2016	
	Rp T	Tumbuh	Porsi	Rp T
Investasi Pemerintah	291.2	8,2%	7,8%	315
Perbankan	279.9	-20,6%	5,5%	222
Pasar Modal	590.0	1,3%	14,8%	598
Capex BUMN	321.5	29,4%	10,3%	416
PMA PMDN	544.6	9,0%	14,7%	594
Internal Funds Korporasi & Lainnya	1720.8	9,9%	46,8%	1891
Total	Rp3.782T			Rp4.040 T

Tumbuh	Porsi	Rp T	2017*		2018*	
			5,3%	5,4%	6,1%	
23%	8,6%	388	8,1%	9,0%		
67%	8,2%	370	9,6%	10,7%		
30%	17,2%	778	17,0%	17,1%		
3%	9,5%	430	10,4%	10,8%		
13%	14,8%	670	15,9%	15,8%		
-1%	41,6%	1881	39,1%	36,6%		
			Rp4.517 T	Rp5.041 T	Rp5.171 T	

Pencapaian target pertumbuhan 2017 dan 2018 diperlukan investasi yang besar dari semua komponen, baik Pemerintah maupun Non-Pemerintah

Arah Kebijakan Pencapaian Sumber Pembiayaan Investasi

...diperlukan kerja keras untuk mendukung pembiayaan investasi 2017-2018

Perbankan

- Pada tahun 2016, KMK dan KI tumbuh 7% dan 8,6%. Pada tahun 2017 KMK dan KI harus tumbuh 11% dan 13%.
- Pada tahun 2018, KMK dan KI harus tumbuh sekurangnya 13% dan 15%.

Pasar Modal

- IPO Saham di tahun 2017-2018 masing-masing harus tumbuh sekurangnya 10% dan 15%.
- *Right Issue* di tahun 2017 dan 2018 harus tumbuh sekurangnya 18% dan 20%.
- *Corporate Bonds*, di tahun 2017 dan 2018 juga harus tumbuh sekurangnya 25% dan 27%.

BUMN

- Pada tahun 2017 dan 2018, semua BUMN harus menghasilkan laba bersih.
- Capex BUMN sekurangnya harus tumbuh sekurangnya 28% di 2017 dan tumbuh 30% di 2018.
- Perlu penguatan setoran dividen dari anak perusahaan BUMN ke Induknya.

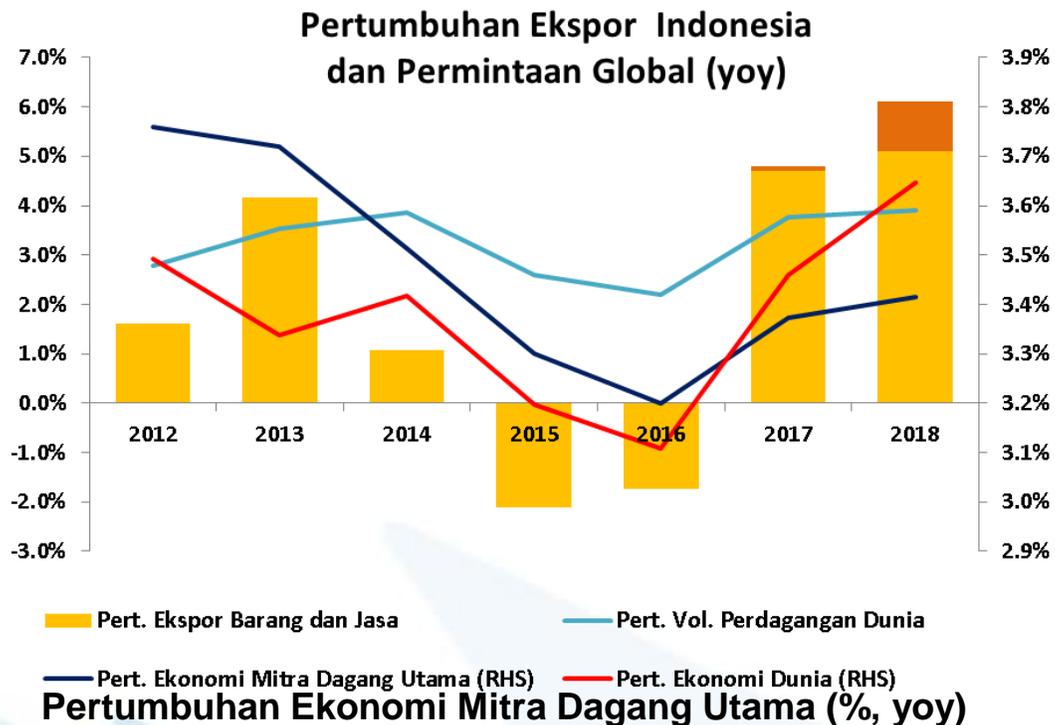
PMA PMDN

- Pada tahun 2017 & 2018, realisasi Investasi Langsung harus tumbuh sekurangnya 22% dan 23%.

Investasi Pemerintah

- Mendorong alokasi belanja Pemda untuk infrastruktur.

Prospek perkembangan ekspor 2018 diperkirakan akan membaik didorong permintaan global terutama negara MTP.



Kinerja ekspor meningkat walau masih pada tingkat harga yang tertahan

- Pertumbuhan ekonomi mitra dagang utama dan permintaan global diperkirakan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2017
- Tren harga komoditas global yang sedikit melambat diharapkan mendorong permintaan.

Dukungan program terkait ekspor

- Upaya pengembangan pasar nontradisional dan produk manufaktur
- Pengembangan ekspor dari sektor UMKM melalui program NIA

Impor akan meningkat seiring perbaikan ekonomi

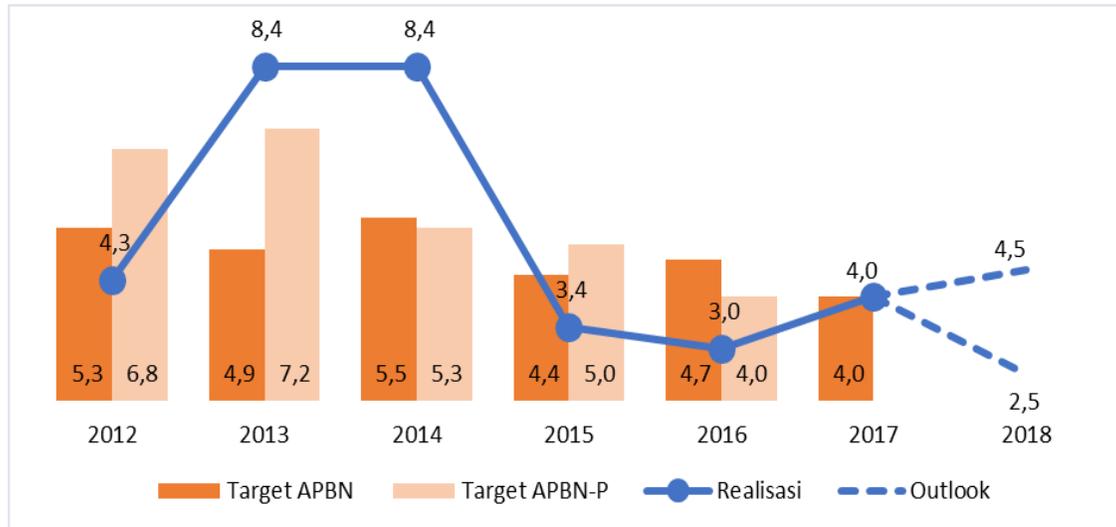
- Kebutuhan untuk investasi dan peningkatan produksi dalam negeri
- Peningkatan terutama pada barang modal dan bahan baku

Sumber: BPS, WEO-IMF, World Bank, diolah

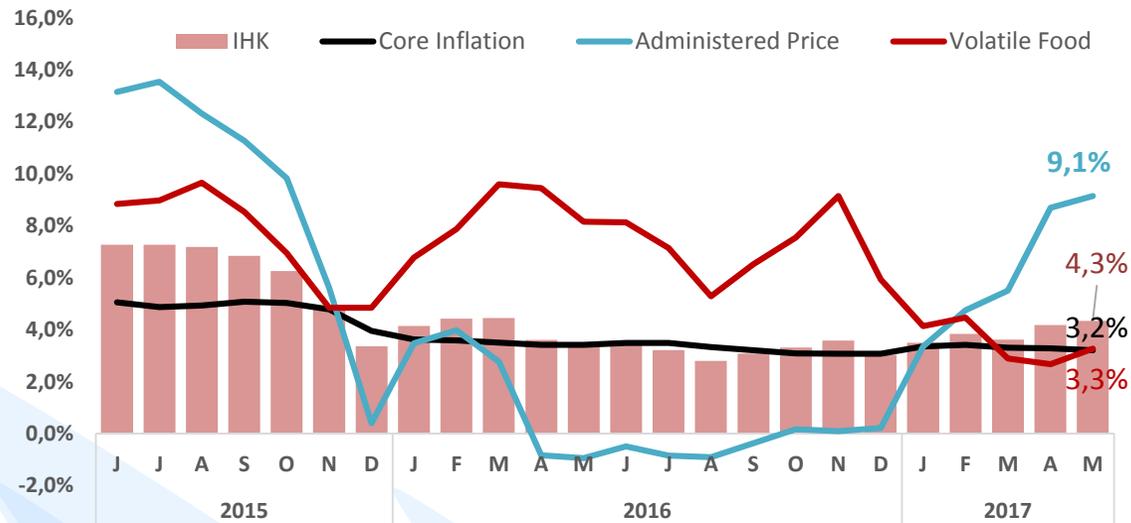


Inflasi tahun 2018 diperkirakan akan relatif terjaga pada kisaran 2,5 - 4,5 persen

Membbaiknya sarana dan prasarana infastruktur akan mendukung stabilnya pasokan dan harga



Sumber: Kementerian Keuangan



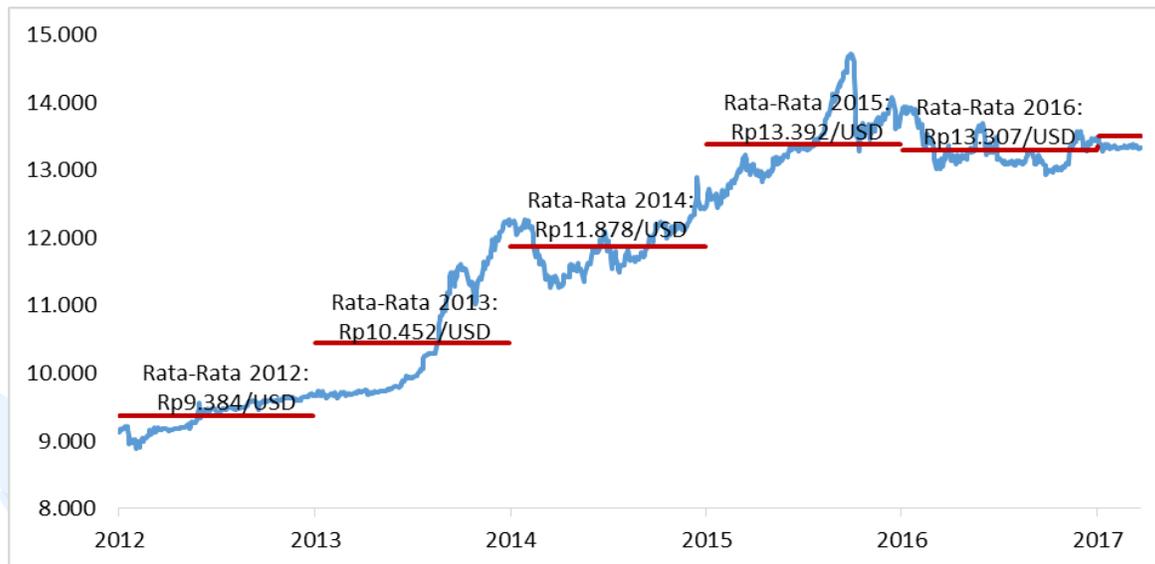
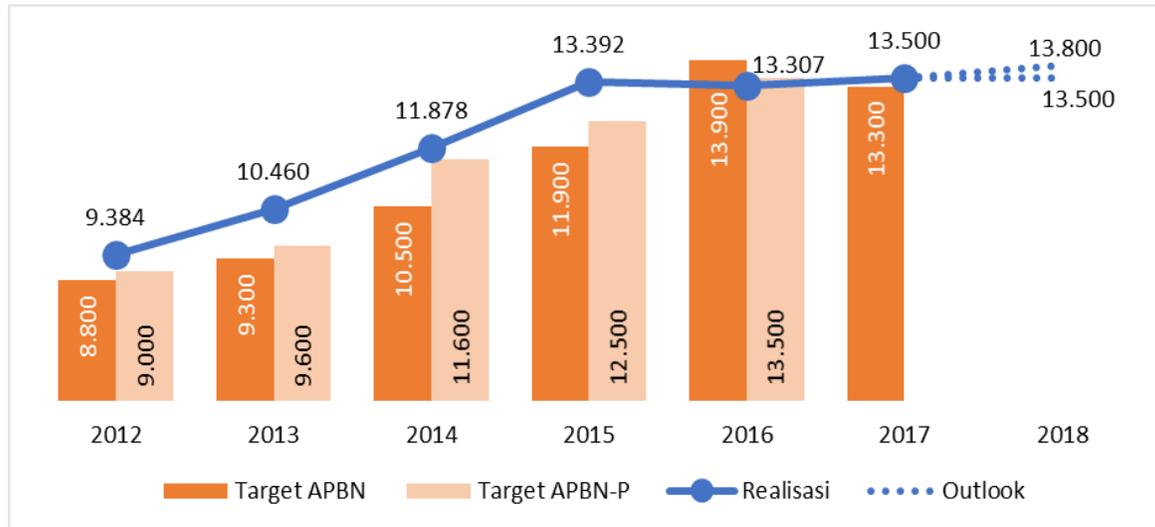
Sumber: BPS, diolah

Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi:

1. Laju inflasi inti diperkirakan mengalami tren peningkatan seiring dengan: proyeksi membaiknya perekonomian global peningkatan harga komoditas global, dan peningkatan permintaan domestik. Namun, inflasi inti masih dapat dijaga pada tingkat yang relatif rendah.
2. Gangguan iklim yang menimbulkan tekanan pada *volatile food* diprediksi relatif minimal di tahun 2018.
3. Pembangunan infrastruktur mendukung peningkatan kapasitas produksi dan perbaikan sistem distribusi.
4. Kebijakan *administered price* (harga diatur pemerintah) akan ditata implementasinya sehingga reformasi struktural dalam rangka mencapai efisiensi ekonomi jangka panjang dapat tercapai.
5. Pembenahan tata niaga komoditas *volatile food*.

Rata-rata Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar AS Diperkirakan Mengalami Depresiasi

...pada kisaran Rp. 13.500-13.800/US\$ di Tahun 2018



Faktor-faktor yang mendorong penguatan nilai tukar rupiah:

- Tingkat volatilitas nilai tukar Rupiah tetap terjaga pada tingkat yang rendah.
- Kinerja perekonomian nasional yang relatif lebih baik : akselerasi proyek infrastruktur), keberhasilan program pengampunan pajak, terjaganya tingkat inflasi, dan penurunan defisit transaksi berjalan.
- Penguatan ekonomi Amerika yang berkontribusi positif dalam kinerja ekspor Indonesia (cadangan devisa), serta
- Masih berlangsungnya *Quantitative Easing* yang diberlakukan oleh ECB dan BoJ.

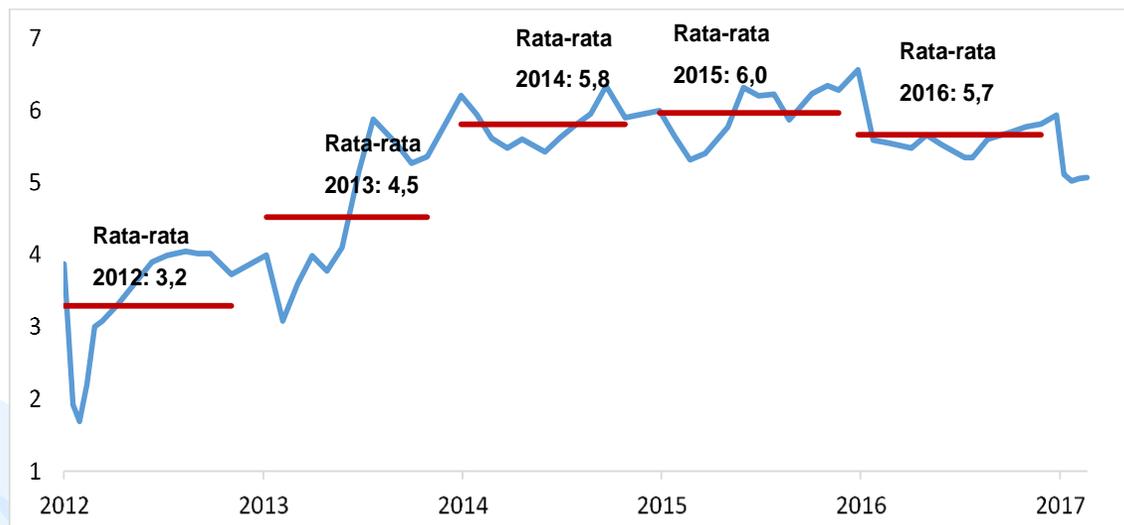
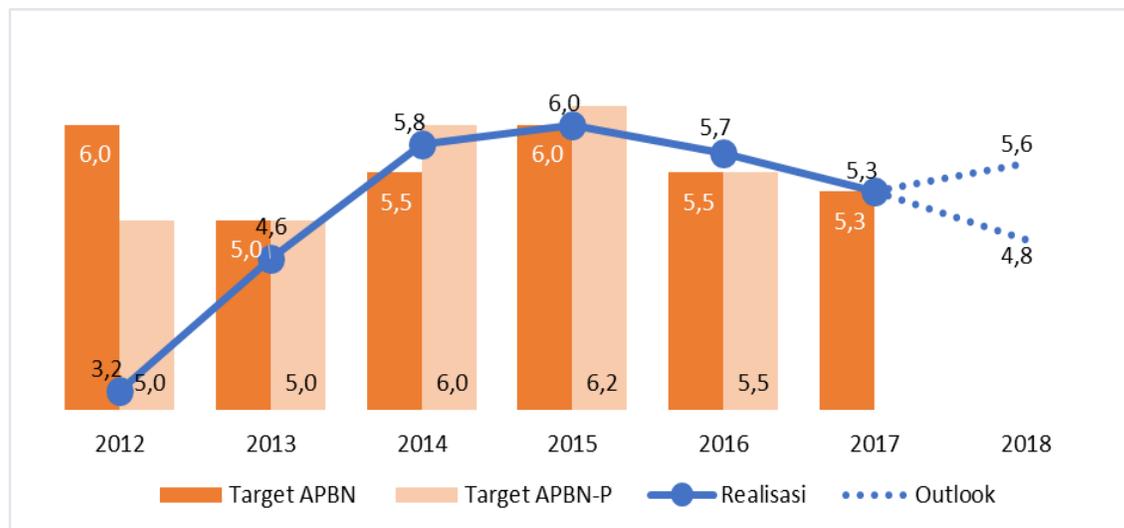
Faktor risiko yang diperkirakan membayangi pelemahan Rupiah :

- Potensi kenaikan suku bunga *The Fed* yang diperkirakan akan dilaksanakan beberapa kali sepanjang tahun 2017-18.
- Perbaikan ekonomi AS mendorong *flight to quality* dalam jangka panjang (estimasi pertumbuhan PDB riil, tingkat inflasi, dan bunga obligasi 10Y meningkat).
- Kebijakan perdagangan AS di bawah pemerintahan baru, *rebalancing* ekonomi Tiongkok, dan ketidakpastian permasalahan geopolitik, terutama antara AS dengan Korea Utara.



Rata-rata Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan Meningkat

...diperkirakan di tingkat 4,8-5,6 persen di tahun 2018



Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat suku bunga SPN 3 bulan:

• Faktor Global

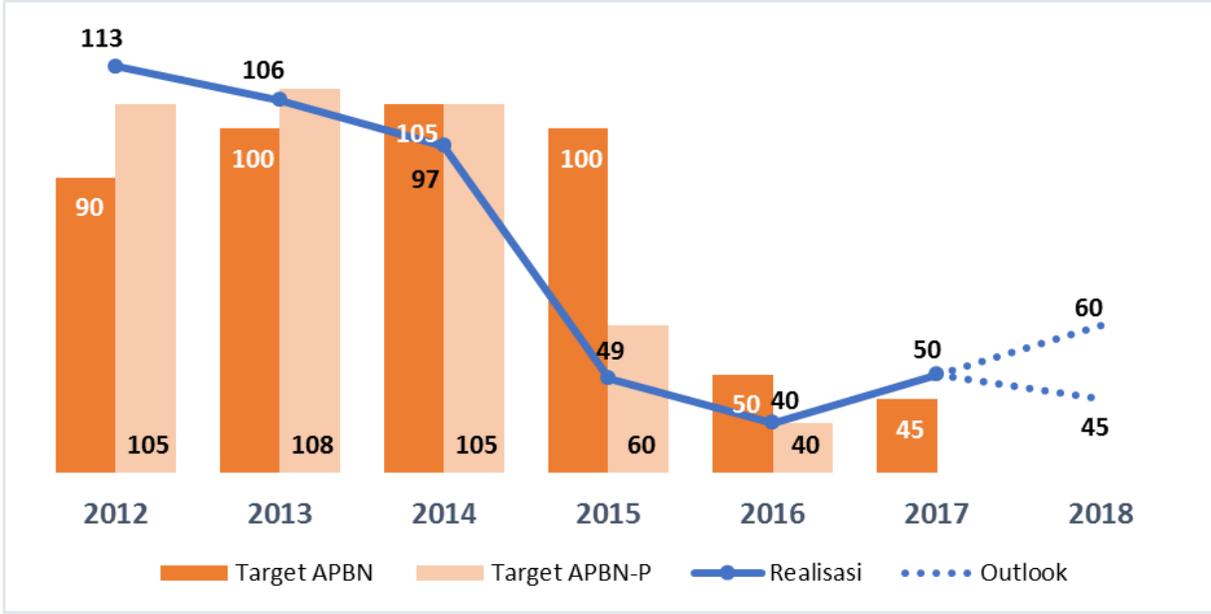
1. Kebijakan fiskal ekspansif di AS mendorong peningkatan suku bunga acuan AS di periode ke depan sehingga berpotensi memicu tekanan pada *capital flow*.
2. Namun demikian, dikarenakan kondisi likuiditas global masih cukup tinggi akibat kebijakan *quantitative easing* di Uni Eropa dan Jepang, dampak kenaikan FFR diperkirakan tidak sampai memicu *outflow*.

• Faktor Domestik

1. Risiko kenaikan suku bunga acuan AS akan memperkecil ruang bagi BI untuk menurunkan suku bunga lebih jauh.
2. Implementasi berbagai paket kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan investasi, mengendalikan inflasi, dan menjaga kondisi fiskal yang sehat
3. Sentimen positif terhadap kebijakan *front loading* dan peningkatan intensitas penerbitan SPN, serta daya serap pemodal lembaga domestik yang relatif meningkat.



Rata-rata harga ICP 2018 diperkirakan sebesar US\$45,0 – 60,0/barel



Sumber: Kementerian ESDM

Source	2017		2018	
	WTI	Brent	WTI	Brent
Bloomberg***	56,23	56,14	61,07	62,23
EIA**	52,50	53,50	55,18	56,18
Consensus Forecast	52,97	54,92	57,67	59,80
IMF*	54,42	56,31	54,51	55,90
World Bank*	55,20	55,20	59,90	59,90
Rerata	54,26	55,21	57,67	58,80

*= rata-rata WTI, Brent, & Dubai **= rilis STEO 11 Januari 2017 *** = per 17 Januari 2017

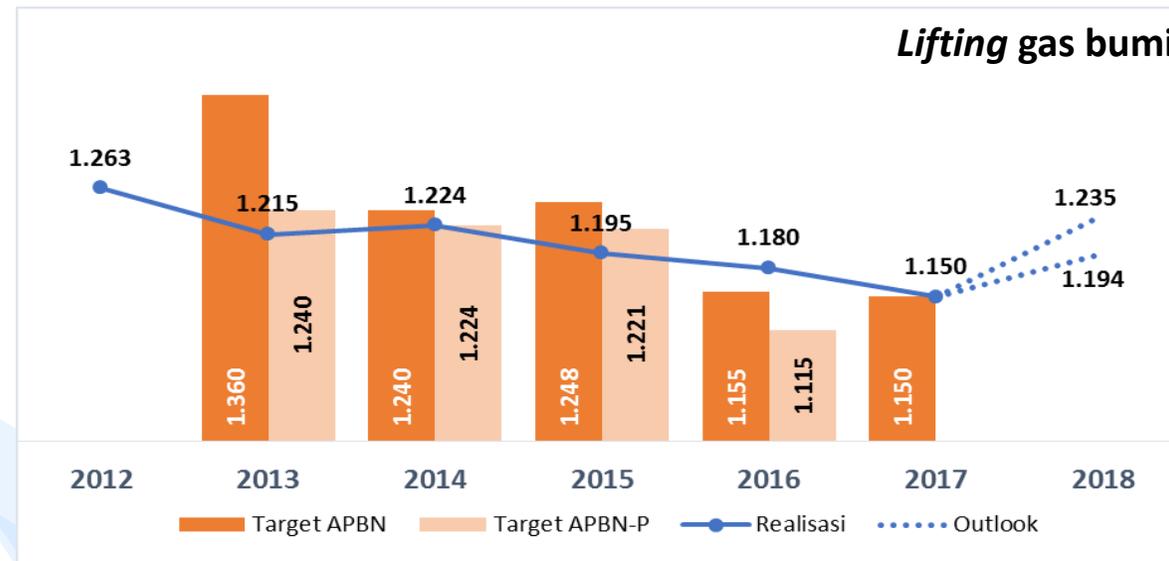
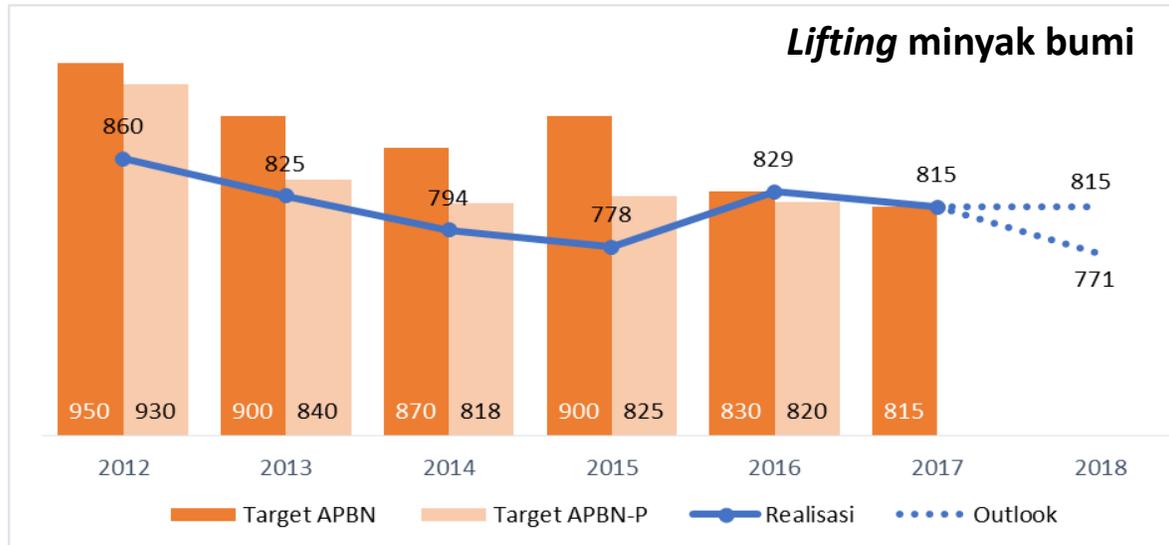
Perkembangan harga minyak mentah dunia

Pada tahun 2017, harga minyak terlihat mulai meningkat terutama disebabkan dampak kesepakatan pembatasan kuota minyak oleh OPEC (diperpanjang hingga akhir triwulan I 2018) dan peningkatan permintaan.

Faktor faktor yang mempengaruhi outlook harga minyak mentah:

- Konsensus perkiraan harga minyak dunia sebagai acuan pada kisaran US\$ 55 – 60 per barel.
- Pemulihan pertumbuhan ekonomi global akan berdampak pada peningkatan permintaan energi termasuk minyak mentah dunia.
- Diperkirakan akan terjadi peningkatan pasokan
 - a. Beberapa negara Non-OPEC memanfaatkan momentum pemangkasan produksi untuk meningkatkan jumlah pengeboran.
 - b. Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif.

Pada tahun 2018, *lifting* minyak bumi diperkirakan berada pada kisaran 771 - 815 ribu bph sementara *lifting* gas bumi pada kisaran 1,19 - 1,23 juta bsmph



Target *lifting* minyak dan gas bumi mempertimbangkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan *on stream*, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan oleh KKKS di tahun 2018.

Upaya pencapaian target *lifting* minyak dan gas bumi 2018:

- Mendorong KKKS untuk melaksanakan program kerja utama, seperti pengeboran sisipan, kerja ulang dan perawatan sumur.
- Melakukan optimalisasi produksi melalui pemanfaatan teknologi seperti *Enhance Oil Recovery* baik sekunder maupun tersier.
- Memperbaiki iklim investasi mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi berkelanjutan, menyederhanakan proses perijinan.
- Mempercepat realisasi proyek pengembangan dengan menyederhanakan proses perizinan dan persetujuan rencana pengembangan (*plan of development*).
- Memonitor pelaksanaan proyek *on-stream* agar dapat tepat waktu. Beberapa proyek lapangan migas yang akan *on-stream* antara lain: Lapangan Jangkrik, Madura BD, serta Blok Wasambo.

2

ARAH KEBIJAKAN FISKAL

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan

Pemerintah Berupaya Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Mengurangi Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Kesenjangan Tahun 2018

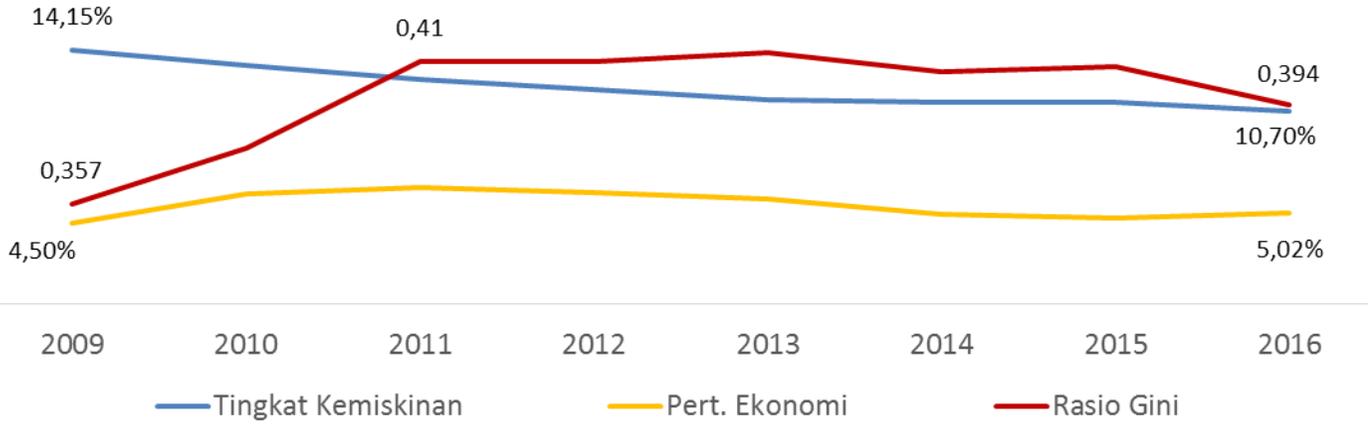
INDIKATOR	2014 (BASELINE)	2015	2016	2017	2018
Pertumbuhan ekonomi, APBN(P) (%)	5,5	5,7	5,2	5,1	-
- Angka Realisasi	5,0	4,9	5,0	-	-
- APBN 2017	-	-	-	5,1	-
- Angka Perkiraan	-	-	-	5,2	5,4-6,1
Tingkat Pengangguran Terbuka, RKP (%)	5,6-5,9	5,5-5,7	5,2-5,5	5,3-5,6	5,1-5,4
- Angka Realisasi	5,94	6,18	5,61	-	-
- APBN 2017	-	-	-	5,60	-
- Angka Perkiraan	-	-	-	5,50	-
Angka Kemiskinan, RKP (%)	9,0-10,0	9,0-10,0	9,0-10,0	9,5-10,5	9,0-10,0
- Angka Realisasi	10,96	11,13	10,70	-	-
- APBN 2017	-	-	-	10,50	-
- Angka Perkiraan	-	-	-	10,40	-
Rasio Gini, RKP	n.a.	0,41	0,39	0,38	0,38
- Angka Realisasi	0,41	0,41	0,39	-	-
- APBN 2017	-	-	-	0,39	-
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), RKP	73,8	74,8	75,3	75,7	71,38
- Angka Realisasi*	68,90	69,55	70,19	-	-
- APBN 2017*	-	-	-	70,10	-

Keterangan: * IPM dihitung dan diperkirakan dengan metode baru

Sumber: Bappenas dan BPS

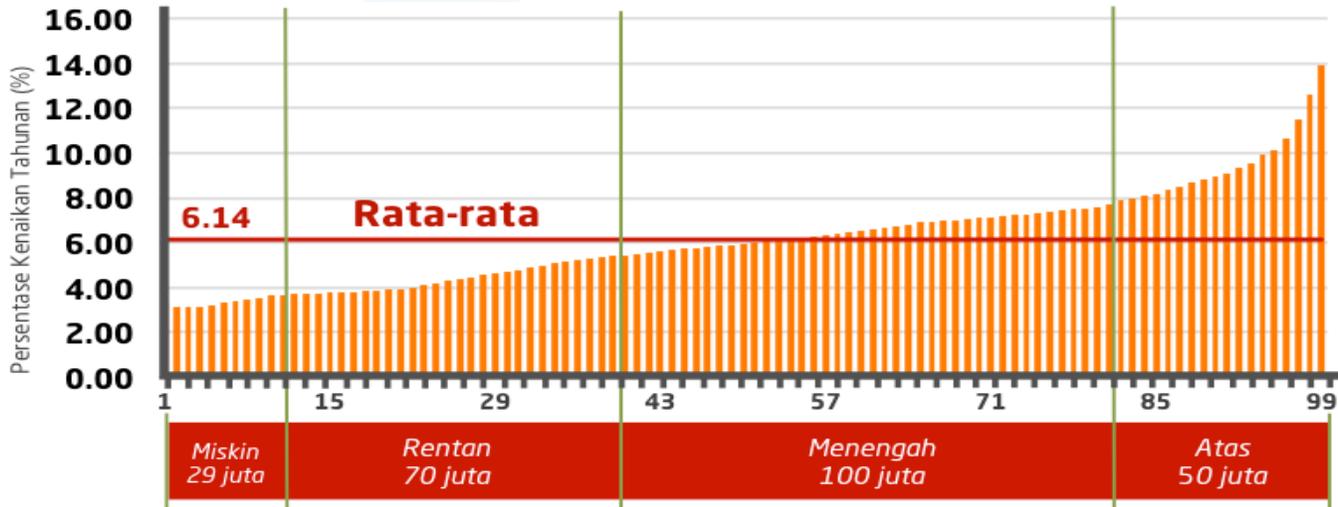
Pertumbuhan ekonomi berhasil mengurangi kemiskinan, namun masih terdapat kesenjangan

Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi, dan Rasio Gini, 2009-2016



Sumber: BPS

Pertumbuhan Konsumsi Riil per kapita 2009-2015



Sumber: TNP2K

- Perekonomian Indonesia tumbuh cukup kuat dalam 10 tahun terakhir dengan rerata pertumbuhan 5,64%.
- Kemiskinan menurun namun penurunannya melambat.
 Pertumbuhan ekonomi ↑1%:
 ➤ 2010-2012: Kemiskinan ↓0,116%
 ➤ 2013-2016: Kemiskinan ↓0,059%
- Kesenjangan meningkat pada periode 2008-2012 setelah itu cenderung stagnan di kisaran 0,4.
- Pertumbuhan ekonomi dinikmati oleh seluruh kelompok tetapi kelompok kaya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok menengah dan miskin.

Tantangan, Sasaran Pembangunan, dan Arah Kebijakan Tahun 2018

TANTANGAN	ISU DAN SASARAN	ARAH KEBIJAKAN EKONOMI 2018
<p>Ketidakpastian Ek. Global</p> <p>Likuiditas Global</p> <p>Harga Komoditas Internasional</p> <p>Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan</p> <p>Pengurangan pengangguran dan peningkatan produktivitas</p> <p>Peningkatan kapasitas fiskal</p> <p>Stabilitas makroekonomi</p>	<p>Mendorong akselerasi dan kualitas pertumbuhan ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas dan daya saing Ekonomi • Mengurangi ketimpangan (kelompok pendapatan dan antar daerah) dan perbaikan Kesejahteraan <p>Perbaikan Produktivitas Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong Investasi, Infrastruktur, <i>Supply</i> Energi, Konektivitas nasional → Peningkatan kapasitas ekonomi dan daya saing • Peningkatan SDM dan daya saing ketenagakerjaan, penguasaan Teknologi, inovasi, SDM, Research and Development <p>Ketimpangan dan Perbaikan Kesejahteraan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan inklusif dan berkeadilan • Jaminan Sosial 	<p>Tema: Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan</p> <p>Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi melalui Perbaikan Produktivitas, Kapasitas dan Daya Saing Perekonomian</p> <p>Stabilitas dan Ketahanan Ekonomi</p> <p>Perbaikan Kesejahteraan & Penanganan masalah Ketimpangan</p> <p>Ketahanan Fiskal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi 5,4% - 6,1% • Tingkat Pengangguran 5,1%-5,4% • Angka kemiskinan 9,0-10,0 % • Gini Ratio 0,38 • IPM 71,38

2018

Pertumbuhan Ekonomi : 5,4 - 6,1%

Kesempatan Kerja ↑

Kemiskinan ↓

Kesenjangan ↓

Sisi Permintaan

Konsumsi RT	: 5,1 - 5,4%
Kons Pemerintah	: 3,8 - 4,3%
Investasi	: 6,3 - 8,0%
Ekspor	: 5,1 - 6,1%
Impor	: 4,5 - 5,5%

Sisi Produksi

Pertanian	: 3,6 - 4,0%
Pertambangan	: 1,4 - 1,7%
Industri	: 4,9 - 5,7%
Konstruksi	: 6,7 - 7,6%
Perdagangan	: 5,5 - 6,2%
Trans & Gudang	: 8,3 - 9,2%
Informasi & Kom	: 10,5 - 11,9%
Jasa Keuangan	: 10,1 - 11,0%

Spasial*

Sumatera	: 5,35%
Jawa	: 5,63%
Bali dan NT	: 6,22%
Kalimantan	: 3,59%
Sulawesi	: 7,83%
Maluku	: 6,10%
Papua	: 6,81%

Investasi berasal dari:

Pemerintah	: 8,1 - 9,0 %
Perbankan	: 9,6 - 10,7 %
Pasar Modal	: 17,0 - 17,1 %
BUMN Capex	: 10,4 - 10,8 %
PMA-PMDN	: 15,8 - 15,9 %
Internal Fund	
Korporasi dll	: 36,6 - 39,1 %

RAPBN-2018 : 2.204T - 2.349T
DEFISIT : 1,9% - 2,3%
PRIMARY BALANCE : -50T s.d -99T

* RKP 2018



Kebijakan Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan

Meningkatkan layanan dasar, infrastruktur, kualitas, dan menurunkan kesenjangan



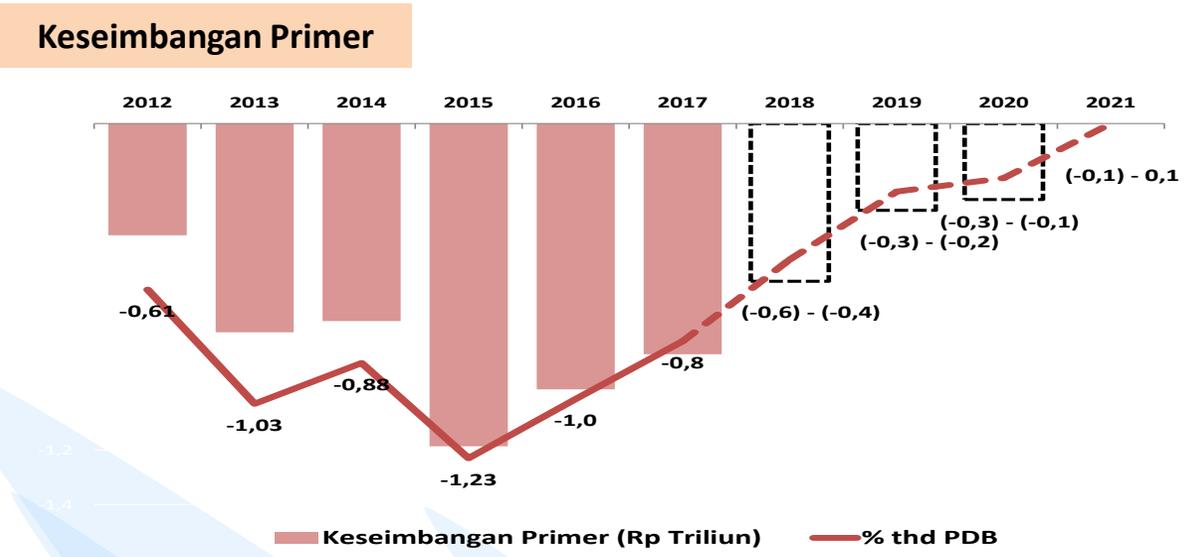
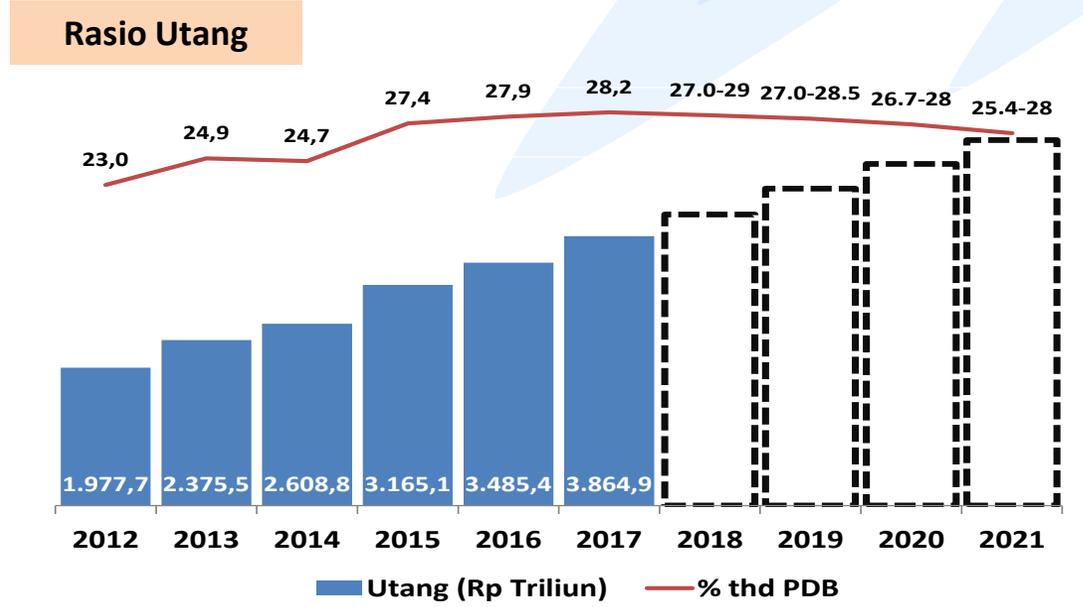
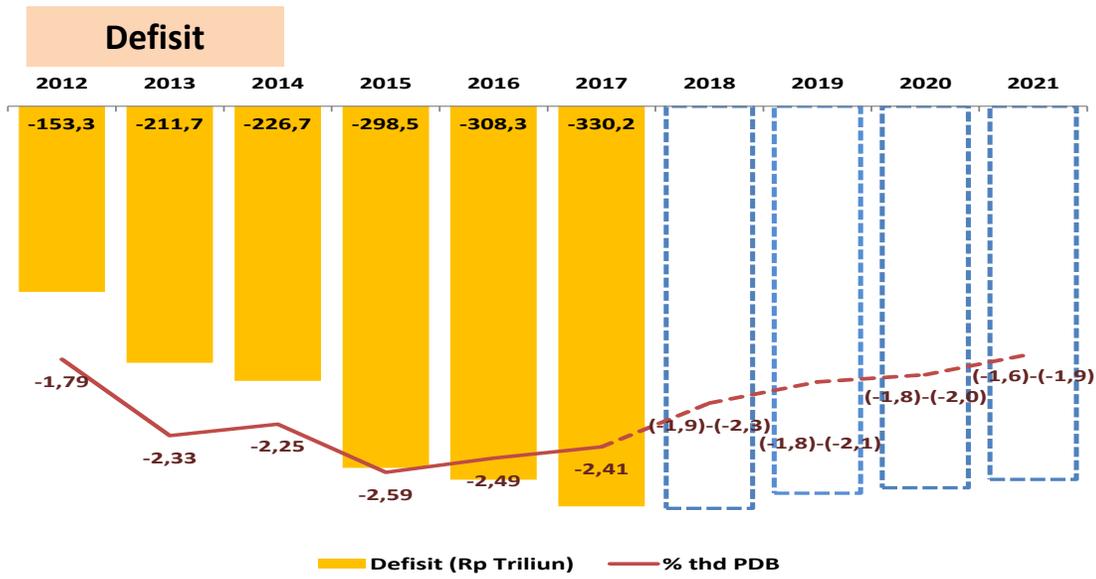
POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL

Arah dan Strategi, Kebijakan Makro Fiskal

Optimalisasi Pendapatan, Peningkatan Kualitas Belanja,
Keberlanjutan Pembiayaan dan *Refocusing* Anggaran Prioritas

Menjaga Keberlanjutan Fiskal

Defisit dan rasio utang dijaga dalam batas aman, defisit keseimbangan primer diupayakan menurun



- Defisit dan rasio utang dikendalikan dalam batas aman. Defisit keseimbangan primer mulai 2018 dibawah Rp100 triliun.
- Arah kebijakan untuk menjaga keberlanjutan fiskal:
 - Defisit dan rasio utang diupayakan menurun serta keseimbangan primer menuju positif;
 - Untuk mendorong keseimbangan primer menuju positif melalui peningkatan *tax ratio* dan efisiensi belanja non prioritas.

ARAH DAN STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL 2018

TEMA RKP 2018

Memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan

TEMA KEBIJAKAN FISKAL 2018

Memantapkan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan

Produktif

Efisien

Berdaya tahan

Risiko terkendali

Pendapatan

Optimalisasi

1. *Tax Ratio*;
2. Pengelolaan SDA dan aset.

Belanja

Penguatan kualitas belanja

1. Peningkatan kualitas belanja modal;
2. Efisiensi belanja non prioritas (belanja barang dan subsidi tepat sasaran);
3. Sinergi antara program yang relevan (program perlindungan sosial);
4. Menjaga dan *Refocusing* anggaran prioritas (Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan);
5. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal

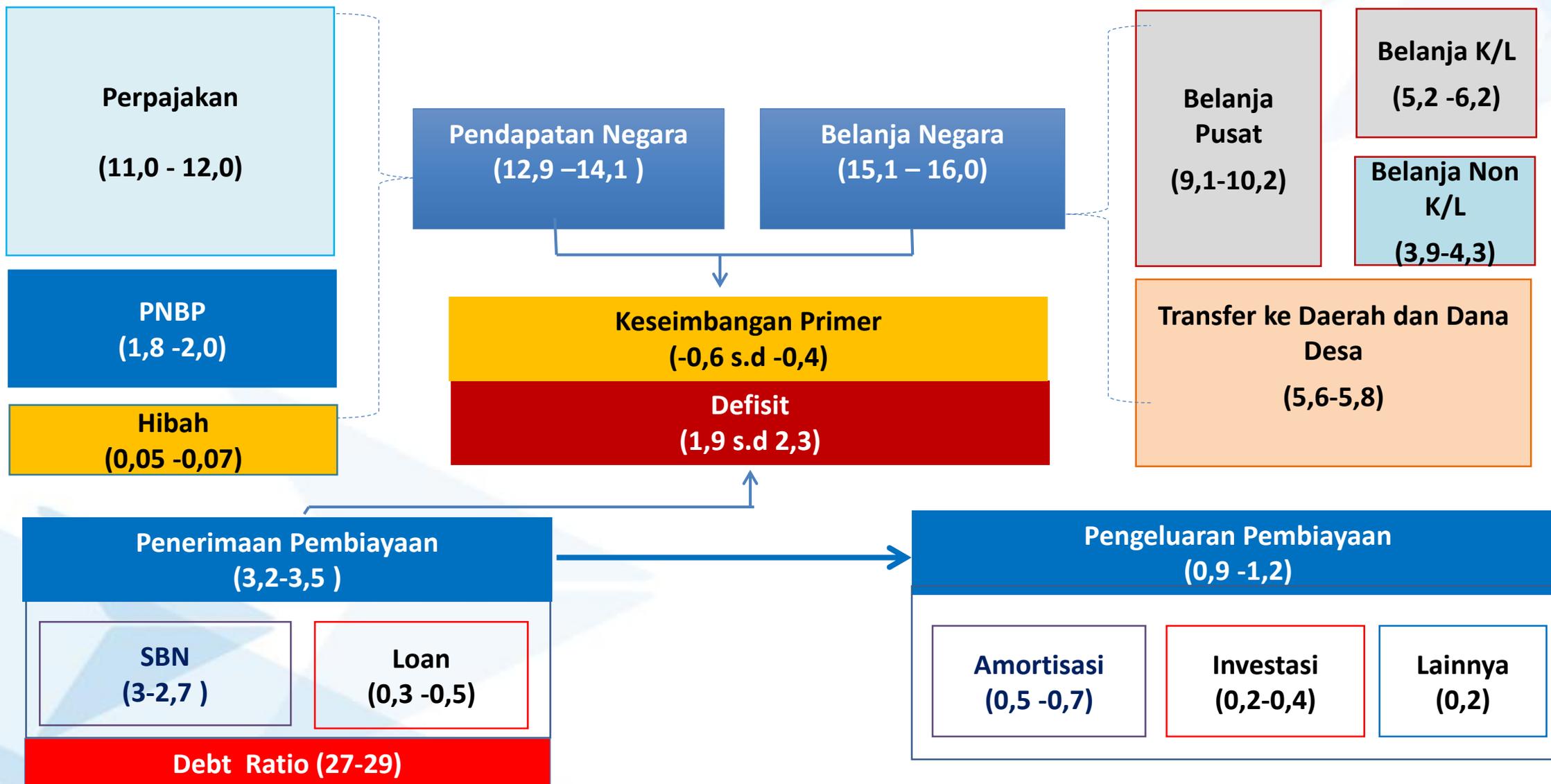
Pembiayaan

Keberlanjutan dan Efisiensi Pembiayaan

1. Defisit dan rasio utang terkendali dan diupayakan menurun dalam jangka menengah;
2. Keseimbangan primer menuju positif;
3. Mengembangkan *creative financing*.

POSTUR MAKRO FISKAL 2018 (% PDB)

Optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas belanja dan penurunan defisit *primary balance*



Arah dan Strategi Kebijakan Penerimaan Perpajakan 2018

Optimalisasi, menjaga iklim investasi dan redistribusi

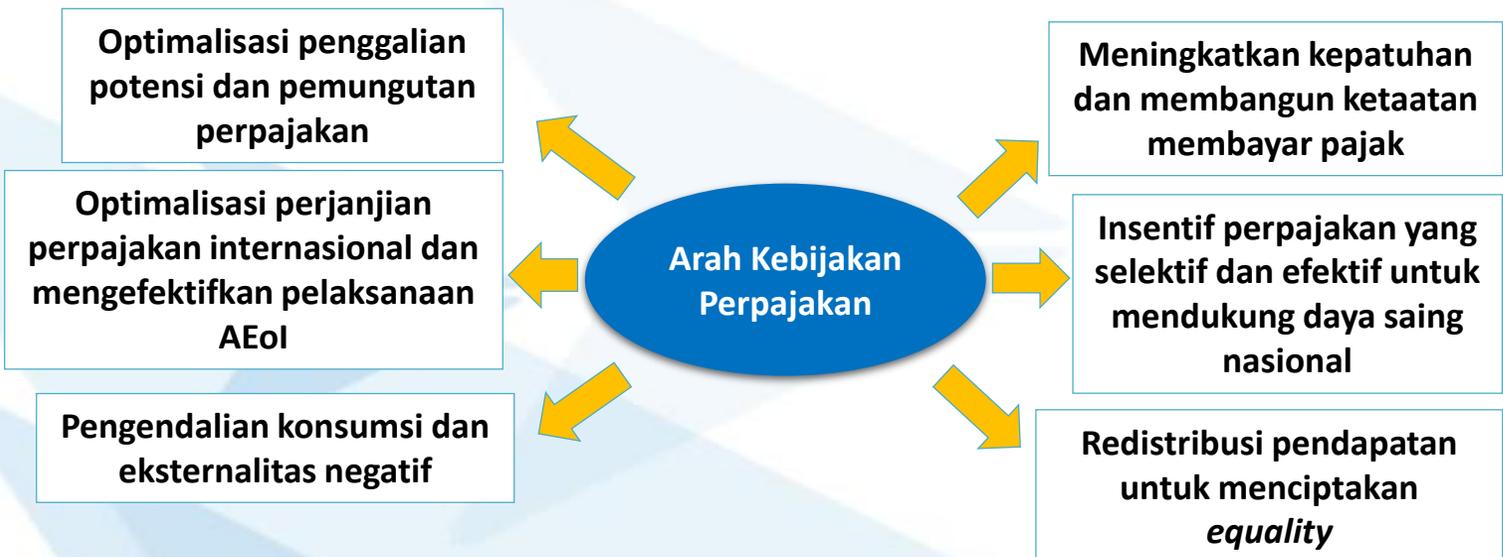
Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017 APBN
Penerimaan Perpajakan	980,5	1.077,3	1.146,9	1.240,4	1.285,0	1.498,9
a. Pajak Dalam Negeri	930,9	1.029,9	1.103,2	1.205,5	1.249,5	1.464,8
1) Pajak penghasilan	465,1	506,4	546,2	602,3	666,2	787,7
a) Migas	83,5	88,7	87,4	49,7	36,1	35,9
b) Nonmigas	381,6	417,7	458,7	552,6	630,1	751,8
2) Pajak pertambahan nilai	337,6	384,7	409,2	423,7	412,2	493,9
3) Pajak Bumi dan Bangunan	29,0	25,3	23,5	29,3	19,4	17,3
4) Cukai	95,0	108,5	118,1	144,6	143,5	157,2
5) Pajak lainnya	4,2	4,9	6,3	5,6	8,1	8,7
b. Pajak Perdagangan Internasional	49,7	47,5	43,6	34,9	35,5	34,1
1) Bea masuk	28,4	31,6	32,3	31,2	32,5	33,7
2) Bea keluar	21,2	15,8	11,3	3,7	3,0	0,3

Kebijakan

- Mereview *exemption* PPN dan merancang insentif fiskal lainnya.
- *Penyesuaian Threshold* PKP/UMKM diturunkan.
- Perluasan objek barang kena cukai.
- Melanjutkan rencana kebijakan tarif cukai hasil tembakau jangka menengah.

Strategi

1. Menuntaskan RUU Perpajakan (KUP, PPh, PPN, dan Bea Materai).
2. Mempercepat reformasi administrasi perpajakan:
 - investasi perbaikan IT DJP untuk memperkuat database sebagai tindak lanjut program TA.
 - memberikan akses perbankan regular kepada DJP, memperkuat akses data pertanahan dan kartu kredit.
 - Melanjutkan *e-filling*, *e-invoice*, dan *e-faktur*.
 - *Joint program* DJP dan DJBC
3. Penertiban penggunaan jasa kepabeanan dan cukai.
4. Penyempurnaan IT pemantauan pita cukai.
5. Otomatisasi pelayanan TPB.
6. Penerapan Layanan *Online Pre Classification*.



Kebijakan PNBP 2018

Optimalisasi pendapatan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan kualitas pelayanan publik

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017 APBN
Penerimaan SDA	225,8	226,4	240,8	101,0	64,9	87,0
Bagian Laba BUMN	30,8	34,0	40,3	37,6	37,1	41,0
PNBP Lainnya	73,5	69,7	87,7	81,7	118,0	84,4
Pendapatan BLU	21,7	24,6	29,7	35,3	41,9	37,6
Total PNBP	351,8	354,8	398,6	255,6	262,0	250,0

Kebijakan

1. Mengoptimalkan PNBP migas, minerba, dan panas bumi melalui penerapan sistem baru (antara lain *gross split* untuk PNBP migas), perbaikan tata kelola, dan pelestarian lingkungan.
2. Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam, dengan melibatkan BPKP.
3. Meningkatkan kinerja BUMN dan pelayanan BLU kepada masyarakat serta optimalisasi pemanfaatan aset/BMN.
4. Mereview beberapa jenis dan tarif PNBP K/L guna mendukung kebijakan Pemerintah dalam kemudahan berusaha dan investasi.
5. Memperluas inter koneksi atau integrasi sistem pembayaran PNBP di K/L dengan Sistem Informasi PNBP *On-Line* (Simponi).

Tantangan

1. Pemulihan harga komoditas minyak mentah yang masih lambat dipengaruhi oleh faktor geo politik dan permintaan global yang masih sangat moderat.
2. Kemampuan pencapaian target produksi minyak mentah dan gas alam, serta barang tambang lainnya yang masih terbatas karena kendala investasi.
3. Optimalisasi PNBP K/L dengan tetap mengupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

ARAH KEBIJAKAN BELANJA NEGARA 2018

Mendorong pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan

- 1** Peningkatan belanja modal dan efisiensi belanja barang untuk mendukung belanja produktif dalam rangka pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- 2** Akselerasi pengurangan kesenjangan dan kemiskinan antara lain melalui **efektivitas program perlindungan sosial, subsidi tepat sasaran, dan *affirmative policy*** (a.l. pengarusutamaan gender), serta **peningkatan kualitas desentralisasi fiskal** melalui peningkatan akurasi data, perbaikan alokasi dan mekanisme penyaluran, *review* besaran bantuan (PIP, PKH), dan sinergi antara program yang relevan (PKH dan Rastra) termasuk perluasan sasaran PKH menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat;
- 3** Peningkatan kualitas SDM melalui **perbaikan kualitas dan akses pendidikan (kompetensi dan distribusi guru, sarpras, penguatan vokasional, *review* perhitungan BOS, sinergi PKH, PIP dan Bidik Misi) dan peningkatan akses serta mutu layanan kesehatan (meningkatkan *supply side*, efektifitas dan keberlanjutan JKN)**;
- 4** Menjaga kesejahteraan aparatur pemerintah **dalam rangka efisiensi dan efektivitas birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik**;
- 5** **Pengembangan sektor unggulan** (ketahanan pangan, ketahanan energi, kemaritiman, pengembangan sektor pariwisata dan industri) melalui antara lain pembangunan bendungan, irigasi, ketenagalistrikan, jalan, bandara, pelabuhan, pengembangan kawasan industri;
- 6** Menjaga stabilitas ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik;
- 7** **Mendukung pengalokasian dana untuk mengantisipasi ketidakpastian dan penanganan bencana alam serta pelestarian lingkungan.**

ARAH KEBIJAKAN UMUM BELANJA K/L 2018

Meningkatkan Efisiensi, Produktifitas, Sinergi dan Refocusing

1. **Melanjutkan efisiensi belanja barang** paling tinggi atau sama dengan 2016 (nominal, tidak perlu disesuaikan dengan inflasi);
 - **Cap policy** belanja barang operasional
 - **Penghematan belanja barang non operasional** (belanja perjalanan dinas, paket *meeting*, honor, & non operasional lainnya);
 - **Penajaman belanja barang** yang diserahkan ke masyarakat atau Pemda.
2. **Peningkatan kualitas belanja modal** → Meningkatkan alokasi belanja modal, dan memprioritaskan belanja modal untuk menstimulasi perekonomian (diarahkan untuk belanja modal produktif seperti jalan, jembatan, irigasi, dll) dan **efisiensi belanja modal untuk pembangunan gedung baru, peralatan dan mesin, serta pengadaan kendaraan bermotor.**
3. **Sinergi Program Perlindungan Sosial dan penajaman Bansos** → perluasan sasaran PKH menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat, sinergi PKH dengan PIP, Bidik Misi, PKH sinergi dengan JKN (untuk meningkatkan akses, mutu layanan bidang pendidikan/kesehatan sekaligus sebagai perlindungan bagi masyarakat miskin.)
4. **Refocusing anggaran prioritas, pada K/L terkait pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur** antara lain:
 - Bidang **Pendidikan** diarahkan untuk **peningkatan akses, kualitas, dan pemerataan** (Guru dan Sarpras), serta penguatan **pendidikan vokasional**;
 - Bidang **Kesehatan** diarahkan untuk **meningkatkan supply side, akses dan mutu** layanan kesehatan;
 - Bidang **Infrastruktur** diarahkan untuk **meningkatkan konektifitas dan kapasitas produksi**
5. **Kebijakan belanja pegawai tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13 (*baseline*) dan menjaga kesejahteraan PNS** dalam rangka efisiensi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Kebijakan Subsidi Lebih Tepat Sasaran Dan Efisien

Penyempurnaan data dan mekanisme untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
					Realisasi	APBN
Subsidi	346.4	355.0	392.0	186.0	174.2	160.1
Energi	306.5	310.0	341.8	119.1	106.8	77.3
BBM	211.9	210.0	240.0	60.8	43.7	32.3
Listrik	94.6	100.0	101.8	58.3	63.1	45.0
Non Energi	39.9	45.1	50.2	66.9	67.4	82.7
Pangan	19.1	20.3	18.2	21.8	22.1	19.8
Pupuk	14.0	17.6	21.0	31.3	26.9	31.2
Benih	0.1	0.4	0.3	0.1	0.4	1.3
PSO	1.9	1.5	2.1	3.3	3.7	4.3
Kredit Program	1.1	1.1	2.8	1.9	5.1	15.8
Subsidi Pajak	3.8	4.1	5.8	8.5	9.3	10.3

Anggaran Subsidi (Triliun Rp)

Kondisi saat ini:

- Penerima subsidi belum sepenuhnya *targeted*, potensi terjadi penyimpangan.
- Database penerima subsidi belum terintegrasi, potensi terjadi *inclusion/exclusion error*.

Kebijakan Subsidi Energi 2018:

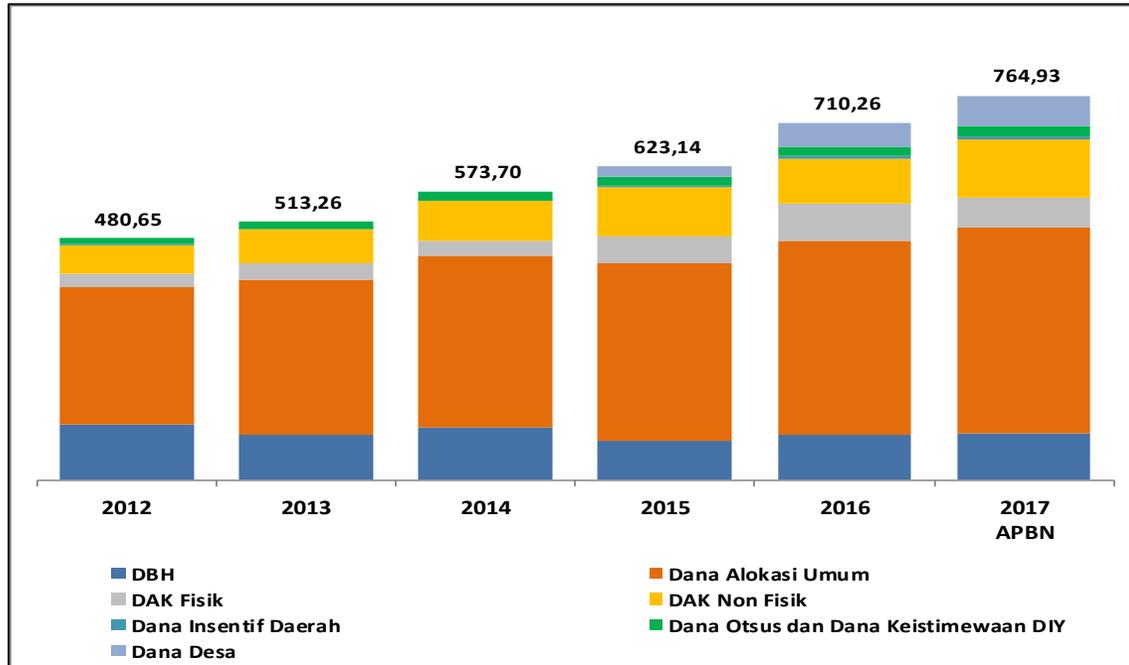
- Subsidi tetap (solar) dan subsidi selisih harga (minyak tanah).
- Melanjutkan **distribusi tertutup LPG tabung 3 kg** secara bertahap untuk RT miskin dan rentan serta penyesuaian harga menuju keekonomian.
- Subsidi listrik **hanya untuk pelanggan R1-450 yang miskin dan rentan**, sementara tarif untuk golongan mampu menuju tarif keekonomian secara bertahap.

Kebijakan Subsidi Non Energi 2018, antara lain:

- Menyempurnakan proses perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK dan mekanisme penyaluran **subsidi pupuk** melalui Kartu Tani
- **Menghapus subsidi benih** dan menggabungkannya dengan program sejenis pada anggaran K/L Kementan
- Melanjutkan kebijakan penyaluran **Rastra dalam bentuk bantuan pangan (non tunai)** secara bertahap dan **memperluas sasaran target penerima** dari rumah tangga menjadi keluarga penerima manfaat
- **Sinergi antara subsidi, bansos, anggaran K/L dan dana transfer ke daerah** agar efektif dan terintegrasi
- Memperbaiki pelayanan umum (**transportasi**) melalui subsidi angkutan KA & kapal laut ekonomi
- Menyempurnakan mekanisme penyaluran KUR dengan prioritas sektor produktif, dan untuk mendukung pengembangan EBT
- Meningkatkan **daya saing usaha dan akses permodalan** bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi kredit program, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum

Penguatan Desentralisasi Fiskal

Peningkatan alokasi TKDD perlu diikuti dengan perbaikan distribusi dan kualitas pemanfaatan di daerah



Tantangan TKDD

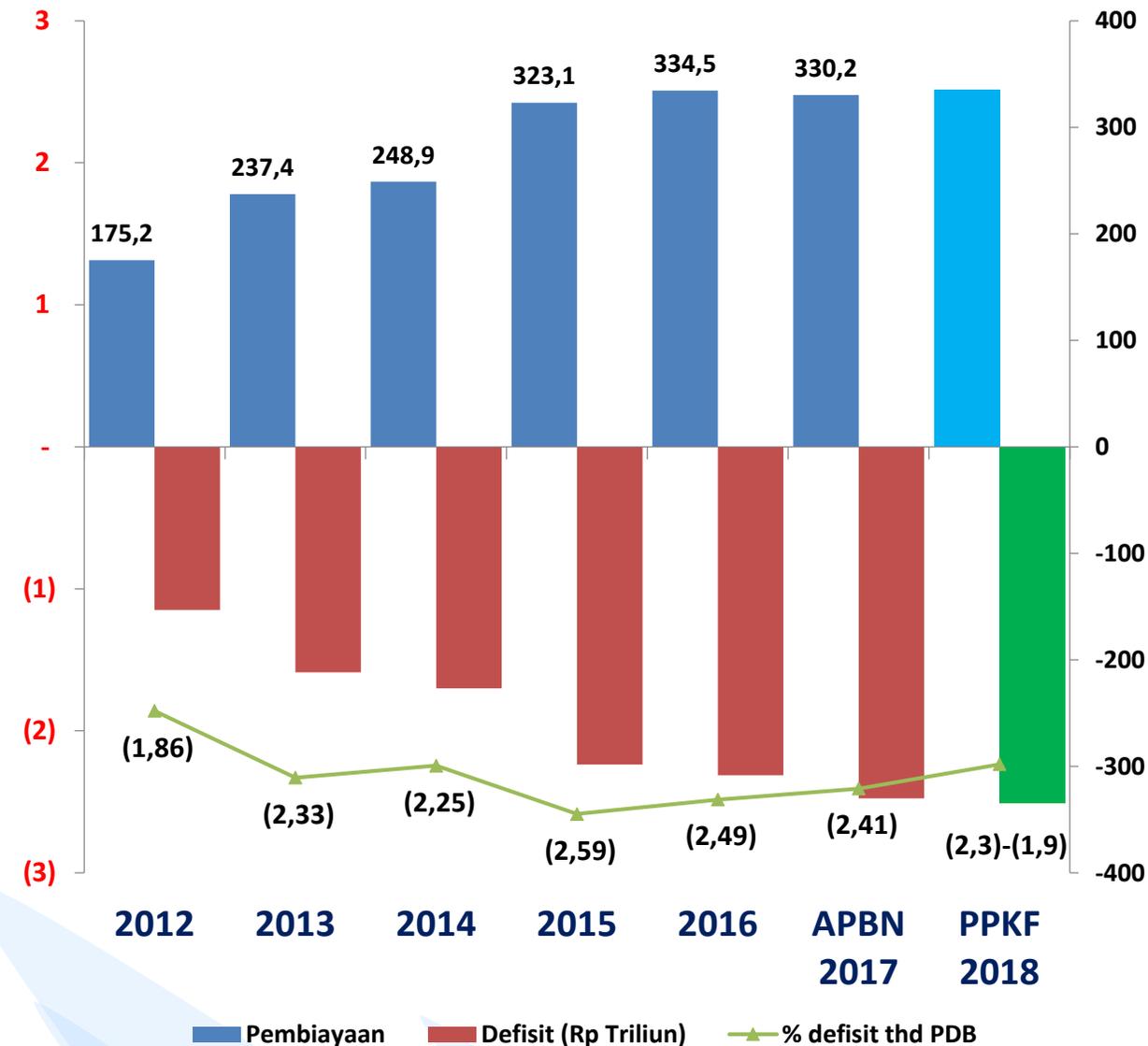
1. Alokasi TKDD meningkat namun masih terdapat ketimpangan pelayanan publik, tingkat kesejahteraan, dan tumpang tindih dengan alokasi belanja K/L.
2. SiLPA APBD relatif besar, sebagian berasal dari dana transfer bersifat *earmark*.
3. Penajaman distribusi Dana Desa untuk peningkatan infrastruktur desa dan pemberdayaan.

Arah kebijakan TKDD tahun 2018

1. Meningkatkan alokasi TKDD secara proporsional dan sinkronisasi perencanaan/penganggaran dengan alokasi belanja K/L.
2. Memperkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Umum (DTU):
 - a. Optimalisasi alokasi, penyaluran, dan penggunaan DBH, serta penyelesaian kurang/lebih bayar DBH;
 - b. Menyempurnakan formulasi perhitungan PDN Neto agar lebih mencerminkan kapasitas PDN yang sebenarnya untuk menetapkan alokasi DAU;
 - c. Pengaturan penggunaan 25 persen DTU untuk belanja infrastruktur.
3. Memperkuat implementasi kebijakan Dana Transfer Khusus (DTK):
 - a. Penyempurnaan dan *refocussing* bidang/subbidang DAK Fisik;
 - b. Peningkatan akurasi data dasar dan biaya satuan pengalokasian DAK Non Fisik;
 - c. Penguatan penyaluran DTK berdasarkan kinerja penyerapan dan pencapaian *output*.
4. Melakukan penguatan DID sebagai instrumen insentif dalam TKDD melalui peningkatan alokasi dan penajaman kriteria pengalokasian DID.
5. Meningkatkan efektivitas pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Keistimewaan D.I Yogyakarta.
6. Meningkatkan alokasi dan reformulasi distribusi Dana Desa dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
7. Penguatan Dana Desa sebagai instrumen peningkatan dan pemerataan kesejahteraan, serta pengentasan kemiskinan.

KEBIJAKAN EKSPANSIF YANG TERARAH DAN TERUKUR

Mendukung pembangunan dan menjaga keberlanjutan fiskal dengan defisit 1,9 - 2,3% PDB



ARAH KEBIJAKAN PEMBIAYAAN INVESTASI:

- Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur al. melalui pembiayaan kreatif;
- Menyempurnakan kualitas perencanaan investasi jangka pendek dan menengah untuk pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan kesiapan rencana proyek, ketersediaan lahan, rencana pemanfaatan dana investasi, kemampuan penyelesaian proyek infrastruktur, serta kemampuan *me-leverage*;
- Mendukung pembangunan infrastruktur, melalui pembiayaan investasi dan kewajiban penjaminan;
- Mengoptimalkan pembiayaan yang kreatif dan inovatif untuk akses pembiayaan bagi KUMKM;
- Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat kurang mampu dengan program afirmasi dan penguatan peran LPDP sebagai SWF;
- Mendukung program peningkatan penyediaan kebutuhan rumah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang lebih tepat sasaran dengan harga terjangkau;

ARAH KEBIJAKAN UTANG:

- **Kehati-hatian** → menjaga rasio utang dalam batas yang aman (27,0-29,0% PDB)
- **Efisiensi Biaya Utang** → untuk efisiensi biaya utang dan menjaga kesinambungan fiskal ke depan
- **Produktifitas** → untuk belanja produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan a.l. pemberian PMN kepada BUMN dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur
- **Keseimbangan** → untuk menjaga komposisi utang DN dan LN dalam batas aman dan terkendali

FOKUS PENGUATAN ANGGARAN PRIORITAS

Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan

ANGGARAN PENDIDIKAN

Menjaga anggaran pendidikan 20%, meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan

ISU STRATEGIS

1. Efektivitas pemanfaatan **anggaran pendidikan 20%**.
2. Peningkatan akses untuk pendidikan menengah dan tinggi dan penurunan tingkat buta huruf di Wilayah Indonesia Timur.
3. **Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum optimal.**
4. **Kualitas pendidikan** masih perlu terus ditingkatkan secara lebih merata.
5. Penguatan **pendidikan kejuruan dan vokasi serta *link and match*.**
6. **Konsolidasi dan sinergi antara Pemerintah Pusat (Kemendikbud dan Kemenag) dengan Pemerintah Daerah.**

Arah Kebijakan 2018

1. Menjaga anggaran pendidikan 20% Belanja Negara dan diarahkan untuk meningkatkan **akses, distribusi, dan kualitas pendidikan.**
2. Meningkatkan **kualitas sarana dan prasarana sekolah.**
3. **Sinergi Pemerintah Pusat dengan Pemda** perbaikan akses dan kualitas;
4. Pengelolaan terhadap jumlah guru melalui pemantauan dan audit data serta **peningkatan kompetensi guru.**
5. **Memperkuat pendidikan kejuruan (vokasional)** dan sinkronisasi kurikulum SMK (*link and match*) serta **penguatan peran LPDP sebagai SWF.**
6. **Sinergi program** peningkatan akses (BOS, PKH, PIP, Bidik Misi dan DPPN) untuk *sustainable education*.
7. Meningkatkan akses pendidikan **melalui *review* besaran bantuan PIP** dengan mempertimbangkan indeks kemahalan.
8. Mengaitkan **kinerja pendidikan daerah dengan kriteria dalam pengalokasian DAU/DAK, serta memperbaiki *earmarking* TKDD** untuk pendidikan.

ANGGARAN KESEHATAN

Menjaga anggaran kesehatan 5%, memperbaiki akses dan kualitas layanan kesehatan

ISU STRATEGIS

1. Keterbatasan dan tidak meratanya distribusi faskes dan tenaga medis di *remote area*
2. Penggunaan anggaran kesehatan untuk program preventif perlu ditingkatkan
3. Tingkat kematian ibu melahirkan masih relatif tinggi
4. Meningkatnya penyakit tidak menular
5. Belum optimalnya peran Pemda dalam mendorong peningkatan kuantitas dan mutu layanan kesehatan
6. Peningkatan efektifitas dan keberlanjutan program JKN untuk mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC) di tahun 2019

ARAH KEBIJAKAN 2018

1. Menjaga anggaran kesehatan 5% untuk meningkatkan *supply side* dan layanan, serta menjaga keberlanjutan JKN
2. Meningkatkan dan memperbaiki distribusi faskes dan tenaga kesehatan
3. Penguatan program *promotif* dan *preventif* yang diarahkan untuk penyakit tidak menular dan program untuk ibu hamil & menyusui
4. Penguatan program JKN
 - Mendorong **efektivitas** (akses, mutu, dan perlindungan keuangan) dan **keberlanjutan program JKN**
 - Mereview jumlah PBI dan penyesuaian iuran
 - Mendorong **peran pemda untuk peningkatan faskes dan pendanaan kesehatan masyarakat miskin** di wilayahnya
5. Optimalisasi anggaran kesehatan
 - Optimalisasi penggunaan DBH CHT dan Pajak Rokok
 - Harmonisasi perencanaan dan pengalokasian anggaran kesehatan Pusat dan Daerah

ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2018

Pertumbuhan ekonomi 5,4-6,1% memerlukan anggaran infrastruktur sebesar 2,7-3,1% PDB



Arah Kebijakan 2018

1. Untuk **mendorong pembangunan infrastruktur**, perlu **konsistensi kebijakan dan komitmen seluruh instansi terkait** untuk meningkatkan anggaran infrastruktur tahun 2018 berkisar 2,7% sd 3,1% PDB dan perbaikan eksekusi.
2. Untuk menutup *financing gap* pendanaan infrastruktur perlu **memberdayakan peran swasta, BUMN, BUMD, Pemda melalui pengembangan pembiayaan kreatif atau skema KPBU atau non KPBU**.
3. **Perlu koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda** agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai kebutuhan daerah namun selaras dengan target nasional.
4. Untuk mengatasi hambatan teknis perlu **perbaikan perencanaan, pola koordinasi yang efektif dan penguatan regulasi**.
5. Meningkatkan komitmen **untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur** khusus pada K/L terkait infrastruktur.

Terima Kasih

